

Budaya Malu

Dede Kosasih

Kong Fu Tse, sebagai filsuf bijak yang juga ahli strategi di jaman China Kuno, suatu ketika pernah ditanya oleh salah seorang muridnya "Ya guru, hal apa saja yang menjadikan suatu bangsa bisa berjaya?" Kemudian ia menjawabnya, ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Pertama, bangsa itu harus punya tentara yang kuat. Kedua, segala kebutuhan badaniah rakyatnya yang melingkupi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan harus terpenuhi secara cukup. Dan terakhir, bangsa itu harus teguh dalam memegang prinsip-prinsip yang diyakininya.

Dengan berpanutan penuh kepada ketiga prinsip itu, niscaya sebuah bangsa akan selamat dari kehancuran. Peristiwa akan terjadinya kehancuran sebuah bangsa, dengan gamblang telah dipertontonkan oleh sebuah negara yang bernama Korea Selatan (Korsel).

Ketika awal berdirinya negara ini, Korea Selatan merupakan sebuah negara yang porak-poranda akibat dua perang besar yakni Perang Dunia II dan berkecamuknya perang saudara. Namun berkat teguhnya memegang keyakinan dan kredonya yang terkenal yakni *Saemaul undongnya*, Korea berhasil bangkit dan berhasil membangun kembali negeri itu dari keterpurukan.

Bila kita mencermati bagaimana posisi awal negara itu, memang dihadapkan pada posisi yang sangat sulit. Negara ini tidak memiliki sumber daya alam yang memadai. Wilayahnya hampir 70% berupa pegunungan yang tersusun atas bebatuan jenis *gneiss* dan granit. Lahan pertaniannya pun sangat terbatas. Dengan kondisi yang sangat sulit ini telah membentuk karakter mereka menjadi manusia-manusia yang unggul, tangguh, ulet dan selalu ingin menang. Dalam pemaparan penulis Barat, dilukiskan bahwa bangsa Korea adalah bangsa yang giat, banyak akal dan memiliki semangat tinggi.

Karena keterbatasan sumber daya alam, bangsa Korea menjadi sadar bahwa perbaikan harus dimulai dengan cara lain. Cara lain itu mereka menyebutnya sebagai *saemaul undong*. *Saemaul Undong* merupakan gerakan perubahan yang berlandaskan nilai-nilai kearifan tradisional bangsa Korea, yakni prinsip *rajin*, *mandiri* dan *kerja sama*.

Melalui prinsip *rajin* ini, rakyat Korsel ditempa untuk bekerja keras secara sungguh-sungguh. Sedangkan melalui prinsip kemandirian, mereka diajarkan untuk tidak tergantung kepada orang lain, tidak mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Implikasinya mereka menjadi sadar dan berani bertanggung jawab penuh atas keputusan-keputusan yang dibuat diri sendiri. Prinsip yang ketiga yaitu semangat *bekerja sama*, yang mendorong rakyat Korsel untuk senantiasa mengedepankan rasa saling percaya, rasa senasib sepenanggungan, saling berbagi sesama anggota masyarakat. Yang tak kalah penting membangkitkan tradisi saling membantu di antara anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka dengan meningkatkan perilaku kompetisi dan partisipasi yang sehat. Atas dasar prinsip-prinsip itulah, berbagai masalah bangsa Korsel termasuk masalah korupsi yang merajalela mulai bisa diatasi dengan sukses.

Budaya Malu

Seiring dengan makin berkembangnya demokrasi di Korsel, meningkat pula rasa tanggung jawab publik para pejabat Korsel. Maka pengunduran diri pejabat publik karena melalaikan kewajibannya merupakan suatu hal yang lumrah dalam iklim demokrasi.

Pengunduran diri Perdana Menteri Lee Hae-chan pada awal bulan Maret 2006 yang baru lalu, terkait dengan skandal golf merupakan salah satu manifestasi dari *saemaul undong* prinsip kedua, yakni kemandirian orang Korea yang berani bertanggung jawab dengan tidak mengalihkan atau mengkambing-hitamkan orang lain. Kasus ini juga merefleksikan peningkatan standar etika (berupa budaya malu) yang diaplikasikan kepada pegawai pemerintah di Korsel. Maka tidak mengherankan jika pengadilan Korsel selama ini telah

berulang kali menjatuhkan putusan bersalah bagi pegawai sipil atas dakwaan suap karena terbukti. Inilah sebuah bentuk komitmen yang sungguh-sungguh dari seorang presiden Korsel Roh Moo-hyun, untuk membuka era dalam menciptakan budaya politik yang bersih meski dapat mengorbankan jabatannya sendiri.

Sejak presiden Roh dilantik Februari 2003 bahkan sebelum itu, sedikitnya telah 30 kasus pengunduran diri pejabat publik baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang berhasil dihimpun dari data radio Korea Internasional, *KBS World Radio*. Kebanyakan dari mereka mengambil langkah mundur tersebut karena merasa bersalah dan malu, bahkan lebih tepatnya lagi karena rasa tanggung jawab yang luar biasa.

Yang menjadi pertanyaan kita adalah, adakah pengaruh budaya mundur rakyat (pejabat) Korsel terhadap negara? Jawabnya ada, yakni pada perekonomian dan industrialisasi negeri itu.

Wajah Perekonomian dan Industrialisasi Macan Asia

Wajah ekonomi Korsel saat berakhirnya Perang Dunia II tidak jauh berbeda dengan perekonomian negeri miskin di Asia dan Afrika. Perang saudara pun membuat kondisi kian terpuruk. Namun, masyarakat Korsel tidak mau duduk termenung merenungi nasib yang memporakporandakan negeri ini. Berbekal "dendam"nya, sekaligus etos kerjanya yang luar biasa, mereka menata kembali ekonomi negaranya. Hasilnya, Korsel kini telah benar-benar bangkit dan menjadikannya sebagai macan Asia. Pendapatan per kapitanya kira-kira 20 kali lipat dari Korea Utara dan sama dengan ekonomi-ekonomi menengah di Uni Eropa.

Kesuksesan bangsa Korea mulai dicapai pada akhir 1980-an dengan sebuah sistem ikatan bisnis pemerintah yang dekat, termasuk kredit langsung, pembatasan impor, pensponsoran dari industri tertentu dan usaha kuat dari tenaga kerja. Pemerintah mempromosikan impor bahan mentah dan teknologi demi barang konsumsi dan mendorong tabungan dan investasi dari konsumsi.

Upaya-upaya pemerintah itulah yang kemudian menjadikan Korea tercatat sebagai pembuat kapal (*ship building*) nomor wahid di dunia. Negara itu juga tercatat sebagai produsen semi konduktor nomor satu, produsen telepon selular nomor dua, produsen tekstil nomor lima, dan produsen kendaraan mobil nomor enam di dunia. Kondisi inilah yang kini menempatkan Korea sebagai ekonomi terbesar ke-11 di tingkat global.

Sedangkan bagi Indonesia, saat ini Korsel merupakan salah satu negara investor terbesar Indonesia. Perusahaan elektronik LG, misalnya, berencana berinvestasi sebesar US\$ 40 juta tahun 2006.

Kini Korsel telah tumbuh menjadi kekuatan raksasa baru. Negeri yang berpenduduk sekitar 49 juta jiwa dengan sumber daya alam tidak sekaya Indonesia itu mampu menghasilkan nilai ekspor US\$ 250 miliar per tahun. Layaklah jika negeri ginseng ini mendapat julukan macan Asia.

Bagaimana dengan Wajah Bangsa Kita?

Lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya adalah ungkapan yang pas untuk menggambarkan kondisi bangsa Korsel dengan bangsa kita, Indonesia. Jika tanggung jawab publik dan tradisi malu sudah akrab dengan pejabat publik dan pengusaha Korsel, lain halnya dengan pejabat publik Indonesia. Jarang sekali pejabat publik Indonesia mengundurkan diri (apalagi bunuh diri) sebagai ekspresi dari rasa malu dan bentuk pertanggungjawaban karena lalai dalam menjalankan tugas. Kontrasnya, pejabat publik Indonesia lebih sering mati-matian mempertahankan jabatannya dan sebisa mungkin menutupi kesalahannya.

Masih segar dalam ingatan, ketika pada awal Maret banyak protes dilancarkan kepada Sekab Sudi Silalahi terkasit surat rencana renovasi kantor KBRI di Seoul, Korsel. Sudi dituduh terlibat kolusi dengan mengeluarkan surat *ketebelece* dan bertindak di luar wewenangnya sebagai sekretaris kabinet. Menghadapi protes tersebut, Sudi tidak bergeming pada jabatannya. Ia bahkan berusaha mengalihkan isu tersebut dengan mengatakan bahwa surat *ketebelece* itu palsu.

Sudi bukan satu-satunya pejabat Indonesia yang bertingkah demikian. Sudah banyak pejabat yang tetap cuek walau sudah diprotes keras, bahkan sudah divonis bersalah oleh pengadilan. Misalnya Akbar Tanjung yang tetap bertahan menjadi Ketua DPR walaupun telah divonis bersalah dalam kasus dana nonbujeter Bulog.

Perbedaan antara pejabat Korsel dan Indonesia itu antara lain disebabkan oleh perbedaan kesadaran akan tanggung jawab publik yang disandang seseorang ketika ia memegang jabatan publik. Pejabat Korsel menganggap bahwa jabatan melahirkan tanggung jawab yang besar kepada masyarakat. Kesadaran itu kemudian mendorong pejabat Korsel untuk meletakkan jabatannya bila mereka gagal melaksanakan tanggung jawab tersebut atau melalaikannya. Tidak hanya tanggung jawab terhadap tugas, tetapi juga tanggung jawab moral. Sedangkan pejabat Indonesia tampaknya belum memiliki kesadaran serupa. Bagi pejabat Indonesia sementara ini, jabatan publik tidak memiliki konsekuensi apa pun terhadap tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Fenomena yang terjadi atas bangsa Korsel itu sekaligus telah membuktikan kebenaran ucapan Kong Fu Tse bahwa dengan keyakinan yang teguh terhadap nilai-nilai (pandangan hidup) suatu bangsa pasti sanggup memperoleh kejayaan. Cag!

** Pemerhati Budaya, Lektor Kepala pada Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI Bandung*